

Judul : Evaluasi Ulang Sistem Demokrasi Langsung
Tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bamsuet Rayu Mahasiswa Evaluasi Ulang Sistem Demokrasi Langsung



Bambang Soesatyo

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengajak generasi milenial, khususnya mahasiswa, mengkaji kembali penerapan sistem demokrasi di Indonesia.

Generasi muda perlu menelaah kembali, apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Para mahasiswa harus berani membuat kajian, dan mengevaluasi sistem demokrasi langsung saat ini. Sistem pemilihan langsung dalam pemilihan pimpinan daerah, pusat atau pun legislatif sangat rentan dengan *money politics*,” ujar Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, usai melakukan Podcast bersama Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM) Islam Negeri Jakarta (UIN) Sultan Rivandi di Jakarta, kemarin.

Ketua DPR ke-20 ini menguraikan, penerapan sistem demokrasi langsung telah membuat demokrasi Indonesia bergantung pada angka, bukan lagi memperjuangkan aspirasi rakyat. Selain itu, sistem demokrasi langsung juga berpotensi menggiring orang terjerat tindak pidana korupsi. Karenanya, banyak kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

“Berdasarkan kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sistem pemilihan langsung daya rusaknya luar biasa. Tidak sedikit kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, karena saat pemilihan mereka mengeluarkan biaya sangat tinggi,” jelas mantan Ketua Komisi Bidang Hukum DPR ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, hasil kajian para mahasiswa dan generasi muda lainnya, bisa saja menyimpulkan tentang perlunya perubahan sistem demokrasi di Indonesia. Terpenting, perubahan yang terjadi harus membawa sistem demokrasi Indonesia menjadi lebih baik di masa mendatang.

“Ke depan, kita tidak ingin sistem demokrasi Indonesia terus terperangkap dalam pameo (ejekan, red) NPWP, Nomor Piro Wani Piro. Kita perlu merefleksi kembali dan mendengar berbagai masukan terkait pelaksanaan sistem demokrasi di Tanah Air,” tandas Bamsuet. ■ ONI